

# **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)**

**Darman Dulahi**

*darmandulahi1975@yahoo.co.id*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The objective of this study is to determine simultaneous and partial influence, both positively and significantly, of the local taxes and general allocation funds (DAU) on financing surplus budget (SILPA) at the district/city in Central Sulawesi Province. Population of the study consists of 11 districts/cities in Central Sulawesi with four-year time series between 2011 and 2014. The object of the study is budget realization reports that are resulted from LHP BPK RI on LKPD of district/city in Central Sulawesi. Data collected is secondary data that analyzed with multiple linear regressions. The results demonstrate that local taxes and general allocation funds simultaneously influence SILPA positively and significantly, which is stated in the determination test results of R- square value of 0.238. Further, F test result of 6.414 with the significance level of  $\alpha = 0.05$  or  $\alpha < 0.05$  reveals the significant value F of 0.004. Partially, local taxes has a positive but insignificant influence on SILPA with coefficient regression of 0.228 with t significance of 0.139. in addition, DAU positively and significantly influence SILPA with coefficient regression of 0.345 with t significance of 0.027.*

**Keywords:** *local taxes, general allocation funds, SILPA*

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal lebih dari satu dasawarsa yang lalu, menjadikan tonggak implementasi dari amanat reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah dengan menyerahkan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai salah satu faktor pendukung kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Mardiasmo (2002;9) salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 22 Ayat 2 menyebutkan bahwa Struktur APBD terdiri dari; Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya dalam pasal 23 dijelaskan bahwa : Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pemerintah mendorong pembangunan secara nasional dengan memberikan dana transfer yang setiap tahun alokasi anggarannya semakin meningkat. Di sisi lain untuk meningkatkan penguatan pendapatan daerah, pemerintah juga telah meningkatkan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat kedepan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin berat dalam mengelola anggarannya sehingga perlu kiranya pemerintah daerah tersebut semakin didorong untuk dapat memanfaatkan sumber pendapatan serta mampu mengefisienkan dan mengefektifkan sisi belanjanya. Dengan kewenangan dan keleluasaan yang dimilikinya dalam menggunakan dana transfer yang diterimanya, daerah diharapkan dapat berbuat banyak untuk melakukan penguatan sektor riil dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan di wilayah masing-masing.

Pajak daerah berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Abunyan (2010; 1) dalam bukunya menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana dengan SILPA begitu pula pajak yang trennya semakin positif dan meningkat dalam 4 tahun terakhir (2011-2014), seperti pada berikut ini:

**Tabel 1. Jumlah Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2014**

Kab/kota	Realiasi Pajak Daerah (Rp. Juta)			
	2011	2012	2013	2014
Palu	26.707	48.528	60.164	79.075
Donggala	15.698	21.224	23.444	21.711
Sigi	2.154	3.032	4.230	7.709
Tolitoli	3.211	3.527	4.360	6.674
Buol	2.194	3.041	10.643	6.718
Parigi Moutong	3.671	4.664	5.084	8.377
Poso	5.035	5.549	6.409	10.062
Morowali	3.078	5.019	6.077	5.478
Tojo Una-Una	3.203	5.423	3.898	5.474
Banggai	12.859	15.602	20.398	28.954
Banggai Kep.	4.261	3.986	3.768	3.983
Banggai Laut	-	-	-	1.701
Morowali Utara	-	-	-	22.521
<b>Jumlah Pajak</b>	<b>475.563</b>	<b>470.716</b>	<b>563.600</b>	<b>757.929</b>

Sumber : LHP BPK RI, Tahun 2011-2014 (data diolah)

Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pajak daerah, sehingga dengan adanya tren positif ini

mengindikasikan adanya kemauan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi daerah yang berasal dari pajak tersebut.

Selanjutnya dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah, hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. (Kusnandar dan

Siswantoro, 2012; 6), dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Seperti halnya Pajak dan SILPA, maka DAU pun mengalami tren yang semakin meningkat dalam 4 tahun. Seperti yang disajikan pada Tabel 2:

**Tabel 2. Jumlah Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2014**

Kab/kota	Realiasi DAU (Rp. Juta)			
	2011	2012	2013	2014
Palu	422.094	512.824	575.235	637.378
Donggala	392.155	464.885	523.667	573.670
Sigi	383.436	442.900	503.991	561.492
Tolitoli	351.740	436.210	487.396	535.155
Buol	328.940	359.942	405.310	454.372
Parigi Mtong	447.591	520.678	588.503	660.265
Poso	433.883	509.605	583.807	642.282
Morowali	435.729	548.248	615.423	286.764
Tojo Una-Una	310.268	373.700	426.316	482.417
Banggai	504.060	580.226	711.135	794.840
Banggai Kep.	323.381	371.918	446.341	347.051
Banggai Laut	-	-	-	153.501
Morowali Utr	-	-	-	395.448
<b>Jumlah DAU</b>	<b>4.333.277</b>	<b>5.121.136</b>	<b>5.867.124</b>	<b>6.524.635</b>

*Sumber : LHP BPK RI, Tahun 2011-2014 (data diolah)*

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah DAU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah transfer dari pemerintah pusat, sehingga dengan jumlah alokasi DAU yang begitu besarnya setiap tahun memperlihatkan betapa pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mempunyai ketergantungan yang besar terhadap dana transfer tersebut. Alokasi DAU yang besar tersebut ibarat dua sisi mata uang logam yang berbeda di satu sisi memberikan motivasi yang besar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar terhadap masyarakatnya, namun disisi lainnya

mengurangi motivasi dalam menggenjot potensi daerah melalui pendapat asli daerahnya.

SILPA dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto, dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, namun dalam realisasinya SILPA tahun berkenaan terdapat surplus anggaran.

SILPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran

pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008, dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Realisasi APBD terdapat dua jenis SILPA. Pertama, SILPA tahun sebelumnya yang merupakan sisa penggunaan anggaran tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Kedua, SILPA tahun berkenaan yang merupakan sisa penggunaan anggaran pada tahun berjalan dan akan menjadi salah satu penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2013). Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa

penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi

Secara nasional SILPA tahun berkenaan mempunyai pergerakan yang meningkat setiap tahunnya, sesuai dengan data yang dipublikasikan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Tahun 2013 bahwa “SILPA tahun berkenaan mempunyai pergerakan yang meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012), bahkan besaran SILPA tahun 2012 hampir mencapai dua kali lipat tahun 2009 (dari Rp 52 triliun menjadi Rp 97 triliun). Kondisi ini menunjukkan gejala yang kurang baik karena semakin besar SILPA tahun berkenaan maka menjadi indikasi semakin besar pula dana yang tidak digunakan dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat.”

Begitu pula perkembangan tahun berkenaan SILPA pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah trennya juga semakin meningkat dalam empat tahun terakhir (2011-2014), seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. Jumlah SILPA Tahun Berkenaan Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2014**

Kab/kota	Jumlah SILPA (Rp. Juta)			
	2011	2012	2013	2014
Palu	37.935	62.934	80.631	69.297
Donggala	59.771	52.288	48.272	61.361
Sigi	58.293	32.100	36.064	43.682
Tolitoli	25.226	37.568	45.841	55.974
Buol	2.748	7.894	37.337	52.134
Parigi Moutong	68.597	67.091	51.422	78.905
Poso	37.678	20.374	36.510	46.945
Morowali	21.101	9.730	24.297	16.486
Tojo Una-Una	48.327	35.675	47.540	64.070
Banggai	85.819	93.643	81.347	101.796
Banggai Kep.	30.068	51.419	74.339	109.116
Banggai Laut	-	-	-	17.950
Morowali Utara	-	-	-	40.213
<b>Jumlah SILPA</b>	<b>475.563</b>	<b>470.716</b>	<b>563.600</b>	<b>757.929</b>

Sumber : LHP BPK RI, Tahun 2011-2014 (data diolah)

Data pada Tabel 3 tersebut menjelaskan perkembangan jumlah SILPA tahun berkenaan yang mengalami kenaikan sangat signifikan, kenaikannya menghampiri 2 kali lipat dari tahun 2011 ke tahun 2014. Kondisi ini mencerminkan masih belum optimalnya proses manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu aktivitas yang terus menerus dan sinergi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Menurut Mahmudi (2010; 5) bahwa SILPA merepresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran sedangkan realisasi penerimaan pendapatan daerah tinggi, maka dimungkinkan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi didandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang rendah, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, maka dimungkinkan tidak terdapat SILPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA).

Syaparudin dan Syamsuddin (2013; 37) dalam jurnalnya menghubungkan antara DAU dan SILPA yaitu bahwa Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rencana program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program untuk tahun kedepan yang pembahasannya dimulai bulan Juli sebelum tahun anggaran dan pada bulan Oktober Raperda APBD telah dibahas bersama eksekutif dengan legislatif, dengan demikian

penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana alokasi khusus belum diketahui angkanya secara pasti kondisi ini berdampak terhadap kurangnya akuratnya perkiraan penerimaan yang menyebabkan tingginya angka SILPA dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mencoba melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan oleh pendapatan daerah yang diwakili oleh variabel Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap SILPA tahun berkenaan dengan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah)”

Hipotesis penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah, kajian teoritis dan kerangka pemikiran sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Dana alokasi umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel (Nasution, 1982:41 dalam Riduwan, 2012:65). Sedangkan menurut Sugiyono (2007) metode kuantitatif

adalah metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas yakni pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU) terhadap variabel terikat yaitu SILPA.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 13 (tiga belas) daerah yaitu; Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu metode sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014; 96)., sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu:

- 1) Memiliki laporan keuangan pada kurun waktu penelitian (tahun 2011-2014).
- 2) Usia daerah menjadi daerah pemerintahan definitif minimal 4 tahun.

Maka sampel yang diambil dari populasi tersebut berjumlah 11 (sebelas) sampel daerah tidak termasuk kabupaten Morowali Utara dan kabupaten Banggai Laut karena tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel disebabkan kedua pemerintah daerah tersebut belum memiliki laporan keuangan pada periode 2011-2013 dan merupakan daerah pemekaran baru dari kabupaten induknya yaitu kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni pajak daerah dan dana alokasi umum serta SILPA kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Data sekunder ini diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) perwakilan provinsi Sulawesi Tengah, sehingga data yang diperoleh berjumlah 44 data yang dihasilkan dari jumlah 11 data kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikalikan 4 tahun (2011, 2012, 2013 dan 2014). Laporan tersebut diharapkan memuat data yang lebih dapat diandalkan karena telah diaudit oleh BPK RI dan mendapat opini yang baik sehingga layak untuk dijadikan data penelitian.

Teknik atau cara pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara menggunakan :

- 1) Metode dokumenter yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, melalui pengumpulan data sekunder, data-data LHP BPK RI atas LKPD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rentang waktu 2011-2014,
- 2) Metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- 3) Metode wawancara yaitu dengan cara melakukan tanyajawab atau *interview* dengan pihak terkait mengenai data dan informasi yang diperlukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Untuk menguji hipotesis besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), yang merupakan suatu alat yang menganalisis tentang keterkaitan variabel independen terhadap variabel dependen, dengan pengolahan data menggunakan software SPSS versi 16, maka model regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$

Dimana:

Y=Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)

$\alpha$ =Harga konstan

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi

$X_1$ = Pajak Daerah

$X_2$ = Dana Alokasi Umum

$\varepsilon$ = Standar error (faktor pengganggu)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskripsi Variabel

#### *a. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten /Kota di Sulawesi Tengah*

Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 11 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2011-2014 penerimaan pajak daerah tertinggi adalah Kota Palu sebesar Rp. 214.474 juta Hal ini disebabkan Kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah kecil, sarana prasarana memadai dan jumlah penduduk terbesar serta sebagai pusat kegiatan pembangunan daerah di Sulawesi Tengah memungkinkan Kota Palu dapat mengoptimalkan penerimaan asli daerah daerah dari sektor pajak daerah, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 15.999 juta. hal ini disebabkan wilayah kepulauan yang tersebar, jumlah penduduk yang sedikit, sarana prasarana yang belum memadai serta belum adanya upaya maksimal dalam menggali potensi wajib pajak baru, serta belum maksimalnya realisasi pajak daerah terhadap target yang tinggi dibandingkan kemampuan daerah dalam mengelola pajak.

#### *b. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota di Sulawesi Tengah*

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anggaran dana alokasi umum yang diterima oleh daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan untuk tahun 2011-2014 penerimaan dana alokasi umum tertinggi adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 2.590.260 juta, hal ini disebabkan jumlah penduduk yang besar disertai luas wilayah

yang besar, serta IKK, PDRB dan IPM yang tinggi. Sedangkan total jumlah DAU terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 1.488.691 juta, transfer terendah dari pemerintah pusat tersebut dengan pertimbangan jumlah penduduknya yang kecil disertai luas wilayah yang sedang, serta IKK, PDRB dan IPM yang rendah serta terjadinya pemekaran wilayah baru di kabupaten tersebut sehingga jumlah alokasi DAU berkurang.

#### *c. Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten / Kota di Sulawesi Tengah*

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa dari 11 daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, secara keseluruhan untuk tahun 2011-2014 jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tertinggi adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp. 362.605 juta, ini disebabkan jumlah alokasi dana alokasi umum yang besar setiap tahunnya tidak imbangi dengan penyerapan anggaran APBD nya setiap tahunnya, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Morowali sebesar Rp. 71.615 juta, disebabkan tidak tercapainya penerimaan pembiayaan sebesar 65,15% serta adanya pemekaran wilayah baru.

### Hasil Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan komputer *SPSS For Wind Release 16,0* diperoleh hasil-hasil penelitian dari 44 responden dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (pajak daerah dan dana alokasi umum) terhadap terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

<b>Dependen Variabel Y = SILPA</b>				
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien Regresi</b>	<b>Standar Error</b>	<b>t</b>	<b>Sig</b>
C = Constanta	9466648693,985	15296399189,104	0,619	0,539
X <sub>1</sub> = PD	0,228	0,235	1,509	0,139
X <sub>2</sub> = DAU	0,345	0,033	2,287	0,027
R = 0,488				
R-Square = 0,238      F-Statistik = 6,414				
Adjusted R-Square = 0,201      Sig. F = 0,004				

Sumber: Hasil Regresi, 2016

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 9466648693,985 + 0,228X_1 - 0,345X_2$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel (X<sub>1</sub>, dan X<sub>2</sub>) memberi pengaruh terhadap variable independen ( Y ) model analisis regresi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dapat interpretasi dari persamaan sebagai berikut:

- 1). Untuk nilai constanta sebesar 9466648693,985 berarti sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 9.466.648.693,985.
- 2). Pajak daerah (X<sub>1</sub>) dengan koefisien regresi 0,228 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pajak daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Artinya bahwa setiap penambahan pajak daerah 1 satuan akan meningkatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 0,228 satuan pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah, atau setiap penambahan jumlah Pajak Daerah Rp. 1 juta, maka akan meningkatkan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 228 ribu pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
- 3). Dana alokasi umum (X<sub>2</sub>) dengan koefisien regresi 0,345 ini berarti terjadi pengaruh

yang positif antara dana alokasi umum (DAU) dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Artinya bahwa setiap terjadi penambahan dana alokasi umum 1 satuan akan mengakibatkan terjadi Penambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 0,345 satuan pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah, atau setiap penambahan dana lokasi umum (DAU) sebesar Rp. 1 juta, maka akan meningkatkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 345 ribu pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

#### **a. Pengujian Hipotesis Pertama**

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni Pajak Daerah (X<sub>1</sub>), dan Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>), dengan variabel tidak bebasnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah:

Hasil uji determinasi (kehandalan model) pada Tabel 4.39 memperlihatkan nilai R-Square = 0,238 atau = 23,80%. Hal ini berarti bahwa sebesar 23,80% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.39 dari hasil perhitungan diperoleh  $F_{hitung} = 6,414$



pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  atau  $\alpha < 0,05$ . Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $F = 0,004$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Sehingga dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil Uji-F ternyata terbukti.

#### ***b. Pengujian Hipotesis Kedua***

Pengujian Hipotesis Kedua secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya yaitu untuk variabel Pajak Daerah terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,228, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,139. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t > 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Pajak Daerah mempunyai pengaruh dan tidak signifikan Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka Hipotesis Kedua yang menyatakan bahwa: Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata tidak terbukti.

#### ***c. Pengujian Hipotesis Ketiga***

Pengujian Hipotesis Ketiga secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya yaitu untuk Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,345, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,027. Dengan

demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pembahasan hasil dari analisis atas pengaruh pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU) terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) bertambahnya pajak daerah yang merupakan komponen PAD dan dana alokasi umum yang merupakan komponen dana perimbangan akan berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syaparudin dan Syamsuddin (2013) yang menyatakan hubungan Pendapatan Daerah dan komponennya (termasuk pajak daerah dan DAU) terhadap SILPA mempunyai hubungan positif dengan kriteria hubungan korelasi sangat rendah sampai dengan korelasi sedang.

Jadi besarnya nilai pajak daerah dan dana alokasi umum yang merupakan komponen penerimaan daerah mempengaruhi besarnya nilai sisa lebih pembiayaan anggaran

(SILPA), hal ini didukung oleh pernyataan Balai Litbang NTT, 2008, (dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012) bahwa SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran.

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dominan dipengaruhi oleh realisasi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat dan hal ini menunjukkan sangat tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah terhadap pemerintah pusat, sementara kecilnya jumlah pajak daerah dalam realisasi penerimaan pendapatan daerah terhadap besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), menunjukkan belum mampunya pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah dalam memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kemandirian daerah.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap SILPA pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah namun tidak signifikan, sehingga hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaparudin dan Syamsuddin (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (termasuk didalamnya pajak daerah) berpengaruh signifikan terhadap SILPA, hal ini disebabkan variabel pendapatan daerah lebih luas komponen - komponen pembentukannya dibandingkan variabel pajak daerah yang

diteliti oleh peneliti, sedangkan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksmi dan Hadi (2013) yang menyatakan variabel SILPA dipengaruhi secara moderat oleh PAD (yang salah satu komponennya adalah Pajak Daerah)

Penerimaan dari sektor pajak daerah tidak mudah dikembangkan karena 2 faktor, pertama, jenis pajak daerah tidak dapat dikembangkan dengan mudah, mengingat hal ini berkaitan dengan obyek pungutan yang sifatnya *given*. Kedua, jumlah wajib pajak lambat bertumbuh berikut besaran pungutan yang juga bersifat tetap, hal ini salah satu penyebab besaran realisasi pajak daerah meskipun melampaui target yang telah ditetapkan tetapi tidak mampu mempengaruhi secara signifikan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran pada satu periode anggaran.

Disamping itu penyerapan realisasi penerimaan pajak daerah di periode anggaran yang sama dapat dimaksimalkan penggunaannya dalam membiayai program dan kegiatan yang berhubungan masyarakat, umumnya realisasi penerimaan pajak daerah langsung dipergunakan dalam pembelanjaan APBD perubahan anggaran di triwulan tiga perodesasi APBD tersebut.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah, sehingga penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Syaparudin dan Syamsuddin (2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap SILPA, dimana hubungan yang paling tinggi adalah hubungan SILPA dengan DAU.

Peranan dana alokasi umum terhadap peningkatan jumlah sisa lebih pembiayaan

anggaran (SILPA) pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah sesuai hasil penelitian memiliki nilai koefisien Beta distandarisasi sebesar 0,345 dan merupakan variabel *independen* yang memiliki peranan (kontribusi) terbesar dibandingkan variabel *independen* pajak daerah yang diteliti.

Peningkatan jumlah SILPA akhir tahun dari transfer dana alokasi umum sesuai dengan pernyataan Rahmawati, 2015 (dalam Ramadhan, 2015) menemukan adanya dana transfer pemerintah pusat yang penggunaannya mendekati akhir tahun anggaran, sehingga penyerapan dana transfer tersebut tidak maksimal 100% dan menyisakan kelebihan anggaran yang tidak terpakai. Disamping itu adanya kebijakan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah terhadap penetapan alokasi DAU di awal tahun dengan menaikkan persentase DAU 2,5% sampai dengan 3% dari jumlah DAU tahun anggaran sebelumnya sebagai dana cadangan DAU tahun anggaran berjalan berdampak pada terbentuknya SILPA pada tahun berkenaan tersebut.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

- 1) Perkembangan selama tahun 2011-2014 untuk pajak daerah di provinsi Sulawesi Tengah, penerimaan tertinggi oleh Kota Palu dan terendah Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk DAU transfer terbesar pada Kabupaten Banggai dan terkecil pada Kabupaten Banggai Kepulauan, sedangkan terbentuknya jumlah SILPA terbesar pada Kabupaten Banggai dan terkecil pada Kabupaten Morowali.
- 2) Peningkatan pajak daerah dan DAU sebagai komponen pendapatan daerah dapat mempengaruhi peningkatan SILPA pada kabupaten/kota di Povinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Pajak daerah dan DAU terhadap SILPA dari 11 kabupaten/kota yang terbaik adalah Kabupaten Sigi, karena SILPA Kabupaten

Sigi lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu peningkatan SILPA dan rata-rata perkembangan SILPA di bawah nilai nol.

### **Rekomendasi**

- 1).Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya peningkatan kemandirian daerahnya harus memperhatikan pengoptimalisasian potensi pendapatan yang dimiliki khususnya disektor pajak daerah dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan melalui intensifikasi PAD sektor pajak daerah dan ekstensifikasi PAD sekor pajak daerah
- 2).Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah harus memperhatikan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum, melalui ketepatan perencanaan alokasi DAU dan target transfer DAU yang realistis serta ketepatan waktu pelaksanaan pencairan dan pembelanjaan DAU serta kemudahan dalam proses pengelolaan.
- 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah SKPD DPPKAD dan Bappeda perlu memperbaiki kinerja khususnya dibidang perencanaan anggaran, dengan meningkatnya anggaran penerimaan dan mengurangi anggaran belanja sehingga angka SILPA dapat ditekan. Karena besarnya selisih dari anggaran dan realisasi penerimaan merupakan faktor prioritas yang menjadi penyebab terbentuknya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada perhitungan APBD kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Anhulaila M. Palampanga, M.S selaku Ketua Tim Pembimbing dan Prof. Dr. H. Ridwan, S.E., M.Si., AK., CA selaku Anggota Tim Pembimbing yang telah banyak meluangkan

waktunya serta memberi masukan dan petunjuk dalam proses pembimbingan selama ini sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abuyamin, Oyok, 2010, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora Bandung
- Dirjen Perimbangan Keuangan, 2013, *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Daerah Yang Berasal Dari Penerimaan Silpa*, Kemenkeu RI 2013
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*, Jakarta
- Izudin H., Syaparudin dan Syamsuddin H.M. 2013, Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan dengan Silpa di Kabupaten Bungo, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2013*, Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro, 2012, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal, *Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*, Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Laksmi, Ratri P. dan Hadi, Syamsul, 2013, Pengaruh PAD, DAU, SiLPA, Realisasi Anggaran dan Tanggal Penetapan Perda APBD Terhadap Anggaran Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah – D. I. Yogyakarta Periode 2007 – 2010, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VIII, No. 1, Desember 2013*, Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia
- Mahmudi, 2010, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, edisi Kedua, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Riduwan, 2012, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesepuluh, CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-22, Penerbit Alfabeta Bandung.